

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : 07 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;

Buku

Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2010.

Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Cetakan ke 1, Kencana Jakarta, 2012

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Pamulang, 2018.

- Bambang Purwoko, Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaranya., Meganet Dutatama. Jakarta, 1999,
- B.D. Sri Marsita G dkk, Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Jakarta, 2013,
- Chandra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia, Cetakan Kesatu. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010, hlm. 2
- Erryl Prima Putera Agoes, Catatan Opini Penegak Hukum, Sapta E Saudara, Jakarta, 2012,
- _____, Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Sapta E Saudara, Jakarta, 2016.
- Djoko Prakoso, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984,
- JAM DATUN, Himpunan Informasi dan Petunjuk JAM DATUN Tahun 1997 Buku XII, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997
- Jimly Assidhiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press (KONpres), 2010.
- H.R. Sadili Sastrawijaya, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indoensia 1945- 1985 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1985.
- Kautsar Senja, Pedoman Jaminan Hari Tua. Visi Media. Jakarta. 2007,
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adyta Bakti: Yogyakarta, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi: alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- R. A Supriyono, Sistem pengendalian Manajemen, Yogyakarta, BPFE,

2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Supriyono, R.A, *Sistem pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2018.

_____, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Rajawali Press, 1986

Soejono Soekanto Dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995 .

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Syukri Akub dan Badaru Baharudin, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012

Uwiyono dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Usman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009.

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012,

Zaini Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.

Jurnal dan Thesis

Irsady, Arif Rahman, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Peningkatan Kewajiban Pemberi Kerja Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

(Studi Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), 2020, *Tesis*, Fakultas Hukum Bisnis dan kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dapat diakses pada <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/188641>.

Latifah, Sinta Lia, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru, 2021, *Tesis*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, dapat diakses pada <https://repository.uir.ac.id/8418/1/191021065.pdf>

Rahim, Reza, Penagihan Piutang Negara Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Melalui Bantuan Jaksa Untuk Pemulihan Keuangan Negara Di Sumatera Barat, *tesis*, Universitas Andalas Sumatera Barat, 2015.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 Edisi I*

Muhamad Yusuf, Slamet Sampurni, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, 2018, *Jurnal Yustika* Volume 21 Nomor 2

Novitasari, A, "Optimalisasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus)", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Semarang,

Website/ Internet

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399>

<https://www.kemenkopmk.go.id/satu-dekade-pembangunan-jaminan-sosial-nasional-di-indonesia>,

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3,

<https://www.bpjsKetenagakerjaan.go.id/sejarah.html>

pada [http:// MA: Jaksa sebagai Pengacara Negara Dapat Mewakili BUMN/BUMD \(detik.com\)](http://MA: Jaksa sebagai Pengacara Negara Dapat Mewakili BUMN/BUMD (detik.com))